



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF   
  NETRAL   
  BAHAN PEMERIKSAAN   
  PERHATIAN KHUSUS

**BP Korupsi Dana Kemenpora Kejaksa**

**KOTA BINTUHAN** - Berkas perkara (BP) kasus korupsi dana Kemenpora RI, hingga saat ini belum rampung. Kendati sudah dilakukan perbaikan dan pemeriksaan ulang terhadap beberapa saksi lainnya. Kemarin (13/11) penyidik Tipikor Polres Kaur kembali mengembalikan berkas tersangka dana Kemenpora RI ke pihak Kejari Kaur.

Bahkan kalau tidak ada halangan, berkas yang menyeret staf honorer Kemenpora, Mu (35) warga Nasal Kabupaten Kaur tersebut P21 atau lengkap. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Kasat Reskrim

Polres Kaur Iptu Ahmad Kairuman, M.SI kepada RB kemarin. Menurutnya pemeriksaan tambahan saksi sesuai petunjuk JPU sudah dilakukan oleh penyidik.

"Untuk pemeriksaan tambahan sudah kita lakukan semua, tadi siang (kemarin red) berkasnya sudah kita sampaikan kembali dan kalau tidak ada halangan minggu depan berkas sudah P 21," singkat Kapolres Kaur AKBP Arief Hidayat, S.IK melalui Kasat Reskrim Iptu Ahmad Kairuman, M.SI.

Terkait dengan penambahan tsk dalam kasus ini, pihak penyidik mengaku

belum ada dan masih menetapkan Mu sebagai tersangka tunggal untuk saat ini. Namun pihaknya tetap yakin ada tersangka lain nantinya karena dalam melaksanakan pungutan

fee batuan dana ke desa-desa di Kaur tidak bisa dilakukan oleh tsk sendiri.

"Untuk tsk lain belum ada, kita tunggu saja perkembangan lebih lanjutnya nanti. Yang pasti kita ingin segera merampungkan berkas tsk Mu dalam waktu dekat ini," kata Kasat Reskrim.

Mu yang juga staf Kemenpora RI diduga telah melakukan korupsi dana bantuan pembangunan sarana olahraga di 14 desa yang ada di Kaur. Dengan cara mengambil fee dari sejumlah kades yang mendapatkan kegiatan tersebut. Fee yang diambil bervariasi mulai dari 10 persen hingga 30 persen. Sementara total dana kegiatan

untuk pembangunan sarana olahraga di 14 desa yang ada di Kaur tahun 2017 yang lalu mencapai Rp 2,2 miliar.

Selain rekan-rekan Mu, penyidik sendiri sudah melakukan pemeriksaan kepada para kades yang menerima bantuan. Dan semuanya mengakui memberikan fee namun ada yang langsung dengan Mu dan juga perantara orang lain. Kasus ini mencuat, setelah banyaknya bangunan sarana dan prasarana olahraga yang dibangun di berbagai desa tidak rampung sesuai harapan. Bahkan saat ini kondisinya pun sudah banyak yang rusak. (cik)